

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masa menjelang pemilu menjadi salah satu ajang para anggota partai politik untuk membangun citra positif di ranah publik. Masa ini pun tak luput dari peliputan media massa untuk memberitakan para aktor politik yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif maupun eksekutif. Berbagai topik pemberitaan muncul, baik yang nadanya positif, netral, atau negatif. Masa ini pun menjadi krusial karena ada saja oknum tertentu yang menggunakan media sebagai alat untuk meraup keuntungan secara politik (Fahadi, 2019). Hal tersebut dikarenakan media mempunyai kekuatan untuk memengaruhi opini publik dengan cara memfokuskan suatu isu yang dianggap penting dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesadaran khalayak bahwa isu tersebut menjadi penting (McQuail, 2010). Proses tersebut dikenal dengan istilah *agenda setting*. Lebih lanjut, Yuliatiningtyas (2023) juga mengatakan bahwa saluran utama komunikasi politik di era modern adalah melalui media massa. Oleh karena itu, menelaah penetapan agenda media dalam masa menjelang pemilu menjadi menarik karena secara tidak langsung agenda tersebut akan menunjukkan kepentingan yang berusaha didorong oleh pihak media.

Dalam demokrasi sendiri, media sebagai pilar keempat diharapkan dapat bertindak sebagai penjaga kekuasaan (Tumber et al., 2019). Ishwara (2017) juga menyampaikan bahwa sudah sepatutnya media menjadi lembaga yang independen dan tidak condong pada sumber yang diliputnya. Artinya, hasil produk jurnalistik harus bebas dari kepentingan terhadap kekuasaan, baik secara politik, ekonomi, sosial, atau pun kepentingan yang lainnya. Selain itu, sebagai *watchdog*, media perlu menjalankan tugasnya untuk memantau dan mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh para pemegang penguasa kepada publik (Echeverría et al., 2021).

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara yang tidak lepas dari pemberitaan adalah terkait dengan kasus korupsi. Dalam survei yang dilakukan oleh Transparency International, indeks korupsi yang ada di Indonesia masih terbilang rendah, artinya kasus korupsi masih saja merajalela. Dalam laman

resminya, Transparency International memperkenalkan diri sebagai salah satu lembaga masyarakat yang secara global mempunyai misi melawan korupsi. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan mengukur *Corruption Perception Index* (CPI) dari masing-masing negara. CPI menggunakan skala 0-100. Negara yang mencapai skor 100 artinya bersih dari korupsi, sedangkan skala 0 menunjukkan banyaknya kasus korupsi di suatu negara. Survei yang dilakukan pada 2022 membuktikan banyak negara masih gagal untuk memberantas korupsi. Dari 180 negara, Indonesia berada di posisi 110 dengan CPI sebesar 34/100. Skor tersebut berkurang 4 poin dari tahun 2021 (Transparency International, 2022).

Menurut Saifulloh dalam Riswandi et al. (2021), korupsi menarik untuk didiskusikan karena tiga alasan utama. Pertama, korupsi mengambil dana untuk membangun kesejahteraan bangsa. Kedua, korupsi adalah tindak kriminal yang dapat membawa kehancuran bagi negara. Ketiga, pelaku tindak pidana korupsi adalah tokoh yang dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai wakil rakyat. Pada akhirnya, kasus korupsi juga menarik perhatian publik karena secara langsung atau tidak langsung, masyarakat juga terkena dampaknya. Salah satu cara masyarakat mengetahui isu korupsi adalah melalui pemberitaan di media. Melalui pengawasan dan pemberitaan yang dipublikasikan, masyarakat juga bisa ikut menilai kinerja dari pemerintah (Natalia, 2019). Stapenhurst di dalam Natalia (2019) mengatakan bahwa media massa memang tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi secara langsung ke pejabat publik yang melakukan korupsi, tetapi media massa memiliki kemampuan untuk mendorong kontrol publik secara tidak langsung.

Maka peran media dalam memberantas korupsi dengan memberitakan isu tersebut dinilai penting karena setidaknya media memberikan dampak kasat mata (*tangible*) dan dampak tak kasat mata (*intangible*) dari konten pemberitaannya (Stapenhurst, 2000). Dampak yang dapat terlihat secara kasat mata adalah pada saat petinggi negara yang melakukan korupsi dipaksa memundurkan diri oleh rakyat setelah tindak kejahatannya diungkap oleh media. Stapenhurst (2000) menjelaskan bahwa media dapat mendesak pihak berwajib dalam hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sedangkan dampak tak kasat mata biasanya berasal dari produk media independen yang sangat berpengaruh yang

dapat menekan isu korupsi yang timbul dari lingkungan sosial yang lebih luas, yakni dari peningkatan pluralisme politik, debat publik, dan meningkatkan rasa akuntabilitas di kalangan politisi dan badan-badan publik (Stapenhurst, 2000). Pendapat Stapenhurst (2000) ini pun sejalan dengan asumsi teori *agenda setting* yang mengatakan bahwa agenda media dapat memengaruhi agenda publik (Griffin, 2009).

Oleh karena itu, peneliti akan mencari tahu agenda dari media yang jangkauannya besar di Indonesia untuk mengungkap kepentingan isu korupsi yang didorong oleh media tersebut. Media yang diteliti dalam penelitian ini adalah *detik.com*. Berdasarkan dari laporan *Digital News Report 2023* yang dikeluarkan oleh Reuters Institute, *detik.com* berada di urutan pertama dari media digital yang paling banyak dikunjungi di Indonesia (Newman et al., 2023). *Detik.com* dipilih untuk melihat bagaimana media yang memiliki audiens yang besar dan tidak terafiliasi dengan partai politik mengagendakan isu terkait dengan korupsi sepanjang masa menjelang pemilihan umum 2024. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan kecenderungan pola agenda media tersebut dalam mengangkat isu terkait korupsi selama masa menjelang pemilu 2024. Untuk melihat pola pemberitaan setiap media, peneliti menggunakan metode analisis isi kuantitatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah ditulis, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana agenda media yang disusun oleh *detik.com* dalam memberitakan kasus korupsi pada saat menjelang pemilihan umum 2024?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berikut pertanyaan penelitian yang dapat diturunkan dari rumusan masalah di atas.

1. Tipe konten pemberitaan seperti apa saja yang kerap kali muncul di *detik.com* dalam memberitakan isu terkait korupsi menjelang pemilu 2024 dalam periode Januari hingga Desember 2023?

2. Siapa saja narasumber yang sering dikutip oleh detik.com dalam memberitakan isu terkait korupsi menjelang pemilihan umum 2024 pada periode Januari hingga Desember 2023?
3. Nada pemberitaan seperti apa yang dominan digunakan oleh detik.com dalam mengemas pemberitaan terkait isu korupsi menjelang pemilihan umum 2024 pada periode Januari hingga Desember 2023?
4. Di mana lokasi yang sering muncul dalam pemberitaan detik.com terkait isu korupsi menjelang pemilihan umum 2024 pada periode Januari hingga Desember 2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasar dari pertanyaan penelitian yang telah disusun, berikut tujuan penelitian ini dilakukan.

1. Untuk menjabarkan tipe konten pemberitaan yang kerap kali muncul di *detik.com* dalam memberitakan isu terkait korupsi menjelang pemilu 2024 dalam periode Januari hingga Desember 2023.
2. Untuk memetakan narasumber yang sering dikutip oleh *detik.com* dalam memberitakan isu terkait korupsi menjelang pemilihan umum 2024 pada periode Januari hingga Desember 2023.
3. Untuk mengetahui nada pemberitaan seperti apa yang dominan digunakan oleh *detik.com* dalam mengemas pemberitaan terkait isu korupsi menjelang pemilihan umum 2024 pada periode Januari hingga Desember 2023.
4. Untuk mengetahui sebaran lokasi yang sering muncul dalam pemberitaan *detik.com* terkait isu korupsi menjelang pemilihan umum 2024 pada periode Januari hingga Desember 2023.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana agenda media *detik.com* dalam memberitakan kasus

korupsi pada saat menjelang pemilu 2024 sehingga penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian yang menggunakan konsep *agenda setting*, terlebih yang berfokus pada kasus korupsi yang digarap pada saat menjelang pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi karya akademisi di masa mendatang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan media massa di luar sana dapat terus menjaga agenda medianya untuk kepentingan publik, bukan condong pada kepentingan kelompok atau individu tertentu. Harapannya, penelitian ini bisa menjadi referensi dan bahan evaluasi bagi perusahaan media untuk tetap menjaga prinsip-prinsip jurnalisme di dalam laporan beritanya, terutama terkait peran pers sebagai *watchdog* dan bagaimana media menjaga independensinya dari pihak-pihak lain.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat awam mengenai standar agenda di dalam media dan bagaimana seharusnya media menjalankan perannya sebagai *watchdog* dalam melaporkan kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi negara, tanpa merobohkan independensi yang sepatutnya dijunjung tinggi oleh pers.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Adapula keterbatasan yang terdapat di penelitian ini. Keterbatasan pertama adalah terkait dengan fokus penelitian yang hanya meneliti pada satu media digital yang ada di Indonesia, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke media konvensional yang turut hadir di kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian dari pendekatan serta metode analisis isi kuantitatif yang dipakai oleh peneliti juga kurang dapat untuk menunjukkan hasil yang mendalam terkait

agenda media dalam memberitakan isu korupsi menjelang agenda politik pemilihan umum 2024, sehingga pendekatan atau metode lainnya dapat melengkapi penelitian ini di masa mendatang.

